

**Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor
UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Pulau Jawa Tahun
2010-2017**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Lia Tresnawati
Nomor Mahasiswa : 15313202
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2019

**Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor
UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Pulau Jawa Tahun
2010-2017**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Lia Tresnawati

Nomor Mahasiswa : 15313202

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh—sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta , 14 Januari 2019

Penulis,



Lia Tresnawati

PENGESAHAN

Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM
Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Pulau Jawa Tahun 2010-2017

Nama : Lia Tresnawati

Nomor Mahasiswa : 15313202

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Rokhedi Priyo Santoso S.E., M.Sc

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH DPK, NPF DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH
SEKTOR UMKM PADA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI
PULAU JAWA TAHUN 2010-2017**

Disusun Oleh : **LIA TRESNAWATI**

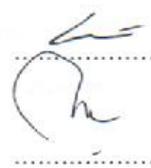
Nomor Mahasiswa : **15313202**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 6 Februari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc

Penguji : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

- ❖ Untuk kedua orang tuaku Bapak Didik dan Ibu Wiwik yang selalu sabar dan ada menghargai , mendukung , mempercayakan semua keputusan yang saya buat dan tidak pernah putus doa yang dipanjatkan untuk saya hingga saya dapat menyelesaikan semua kewajiban saya hingga saat ini.

- ❖ Untuk semua sahabat saya Corry , Diah , Enen , Wuri, Desi , Iga , Auzzia, Shindid dan Rosyid yang selalu membantu , mendukung dan mempercayakan semua kepada saya bahwa saya dapat menyelesaikan keputusan yang saya ambil dan menemani dalam keadaan suka maupun duka.

MOTO

- ❖ Jangan hanya memiliki mimpi yang besar tetapi memiliki komitmen yang besar.

- ❖ Mencoba hal baru , hadapi tantangan baru, selesaikan dengan tanggungjawab.

- ❖ Setiap kerja keras dan pengorbanan membantu sesama yang membutuhkan akan menuai hasilnya yang terbaik.

- ❖ Tidak ada kata putus asa hanya ada kata bertawakal kepada Allah.

- ❖ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (5). Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain) (7), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap(8).

(QS. Al Insyirah)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan atas karunia dan limpahan rahmat Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Pulau Jawa Tahun 2010-2017”. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada bimbingan Nabi Muhammad SAW.

Rasa syukur tak lupa penulis panjatkan karena atas ijin-Nya mampu menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat memenuhi syarat untuk mendapat gelar Sarjana Strata 1 pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis berharap semoga ada ilmu yang bermanfaat dari skripsi ini. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dan penuh berkah ilmu.
3. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Rokhedi Priyo Santoso S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan waktunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Kedua orang tua saya mama Wiwik Rahmawati dan babe Didik Permana yang sangat saya sayangi terima kasih selalu memberikan doa dan restu untuk saya.
8. Seluruh civitas akademik program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UII.
9. Sahabat-sahabat saya di kampus Corry F, Diah Larasati , Enentia N , Wuri Handayani, Iga Septi , Desi Amelia, Silvi N , Jesicha S, Berliana K, Hanida R, Neli Cahyani, Ayu Damaya, Nabella S, Khori D dan Auzzia Hilmy, Laqin S, dan Abdurroyid L yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada saya. Terimakasih telah menemani dimasa perkuliahan dengan berbagai rintangan yang dihadapi sampai sekarang ini.
10. Sahabat-sahabat saya sewaktu KKN Wiwid, Faza, Fajar, Alfin , Jati yang selalu menerima segala keluh kesah saya dan selalu memberikan dukungan kepada saya
11. Teman-teman Ilmu Ekonomi 2015 yang sama-sama sedang berjuang. Terima kasih.

12. Semua pihak yang telah memberikan saya motivasi dan dukungan.

Penulis menyadari, tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis berharap kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 11 Februari 2019

Penulis,

Lia Tresnawati

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Bebas Plafiarisme	iii
Pengesahan Skripsi	iv
Pengesahan Ujian	v
Halaman Persembahan.....	vi
Motto.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran.....	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah	6
Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
Sistematika Penulisan.....	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
Kajian Pustaka.....	9
Landasan Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data	28
Definisi Operasional Variabel.....	29
Metode Analisis	30
Pengujian Hipotesis.....	33
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	35
Analisis Deskripsi Data.....	35
Deskripsi Objek Penelitian	36
Hasil Uji Regresi Panel	40
Pemilihan Model	40
Estimasi Fixed Effect	45
Pengujian Hipotesis	46
Analisis Ekonomi	51
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan UMKM	51
Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan UMKM	53
Analisis Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan UMKM	55

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI	57
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabel Pembiayaan UMKM Tahun 2015-2017 pada Pulau Jawa (Milyar Rp)..	3
1.2 Tabel DPK Tahun 2015-2017 Pada Pulau Jawa (Milyar Rp).....	4
2.1 Tabel Kriteria Jenis Usaha Menurut Omzet dan Asset	16
2.2 Tabel Kerangka Pemikiran.....	26
3.1 Tabel Definisi Operasional Variable.....	29
4.1 Tabel Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2017 (Milyar Rupiah).....	36
4.2 Tabel Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2017 (Milyar Rupiah).....	37
4.3 Tabel Inflasi Berdasarkan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2017(%) ...	38
4.4 Tabel Non Performing Financing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2017 (%)	39
4.6 Tabel Hasil Common Effect Models.....	40
4.7 Tabel Hasil Fixed Effect Models	41
4.8 Tabel Hasil Uji Chow.....	42
4. 9 Tabel Hasil Uji Hausman	43
5. Tabel Hasil Random Effect Models	44
5.1 Tabel Hasil Fixed Effect Model.....	45

5.2 Tabel Hasil Fixed Effect Models	46
5.3 Tabel Hasil Cross Effect	48
5.4 Tabel Hasil Periode Effect	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Pembiayaan UMKM Syariah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Inflasi di Pulau Jawa 2010-2017	66
Hasil Estimasi Common Effect Models	68
Hasil Estimasi Fixed Effect Models	69
Hasil Uji Chow	69
Hasil Estimasi Random Effect Models	70
Hasil Uji Hausmant	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar Cross Section Pembiayaan Syariah Sector UMKM.....	49
Gambar Periode Effect Pembiayaan Syariah Sector UMKM.....	51

ABSTRAK

Skripsi memiliki judul “Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi Terhadap Pembiayaan UMKM Syariah Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Pulau Jawa Tahun 2010-2017”, dengan memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui yang mempengaruhi Pembiayaan UMKM syariah yaitu pada Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan NPF. Jenis dari penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) ataupun Badan Pusat Statistika (BPS) dengan *cross-section* yaitu Pulau Jawa dengan *time-series* yaitu tahun 2010-2017. Dengan menggunakan data Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Inflasi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial sedangkan menggunakan metode pengolahan data dengan Panel. Dengan adanya *coss-section* pada provinsi di Pulau Jawa dengan *time-series* pada tahun 2010-2017, dengan alat analisis *evIEWS 9*. Hasil dari pengolahan data adalah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM Syariah pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Inflasi berpengaruh pada Pembiayaan UMKM Syariah pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sedangkan pada NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM Syariah pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan UMKM, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, NPF

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada kondisi pasar di Indonesia saat ini mengalami pergeseran pemikiran pada tahun 2000-2010 yang pada awalnya berpikiran bahwa tenaga kerja lebih memilih untuk bekerja dalam pemerintahan karena adanya dana pensiun yang menjaminkannya dengan gaji yang jelas. Akan tetapi mulai mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Dengan ini mulai tahun 2010 mengalami pergeseran pemikiran yang beralih pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Tahun 2018 UMKM menjadi perhatian pemerintah karena berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia diantaranya sebagai sarana yang menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong kemajuan perekonomian dengan menciptakan sektor swasta. Sehingga UMKM dapat berperan penting pada pembangunan ekonomi.

Dimana dikatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa di sektor UMKM berkontribusi semakin meningkat mulai dari 57.84% menjadi 60,34% dapat dikatakan bahwa Sektor UMKM juga disebut mampu menyerap tenaga kerja di dalam negeri. Selain itu pada tenaga kerja, UMKM yang juga semakin berkembang dari 96,99% menjadi 97,22% dalam waktu yang singkat. (Mubarok, 2018)

Meskipun mengalami peningkatan UMKM tetap terjadi adanya kendala yang muncul diawal adanya UMKM diantaranya permodalan, pendistribusian, perizinan , pembukuan yang masih manual dan pemasaran online . Dengan ini pemerintah memberikan fasilitas dalam menanganinya diantaranya dengan cara untuk mengatasi masalah permodalan, pelaku usaha sebenarnya dapat memperoleh akses kredit ke perbankan. Namun, tak mudah dilakukan karena pelaku UMKM kadang kesulitan membuat pencatatan keuangan atau pembukuan yang baik.

Oleh karena itu pemerintah memberikan bentuk pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Dengan berbagai produk seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMi / Kredit Ultra Mikro , peminjaman modal dari lembaga pemerintah melalui konprasi dan kementerian UMKM. Pemberian produk permodalan pemerintah awalnya belum memberikan dampak signifikan.

Akan tetapi muncullah persoalan seperti bunga yang diberikan KUR menurutnya masih memberatkan, masalah di atas yang paling terlihat pada bunga yang dirasa masih memberatkan. Menyebabkan banyak yang membayar telat atau tidak membayar menjadikan hutangnya semakin meninggi. Pada tahun 2018 pemerintah memberikan kebijakan untuk menurunkan bunga KUR dari 9% menjadi 7% dengan tujuan mendukung UMKM (Ariyanti, 2017).

Pada kenyataanya penggunaan KUR lebih banyak pada sektor produksi yang memiliki risiko tinggi dari pada perdagangan. Hal tersebut membuat pemerintah

merencanakan akan membuka KUR Khusus untuk sektor perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat .Dengan pemerintah sudah mempermudah dalam permodalan UMKM seharusnya kredit macet akan lebih berkurang (Ariyanti, 2017).

Dengan berbagai permasalahan dari KUR di atas membuat masyarakat bergeser yang menggunakan KUR menjadi lebih berminat pada pembiayaan syariah. Dimana masyarakat belum paham akan Bank Syariah yang memiliki fasilitas dalam pembiayaan. Akan tetapi OJK mengatakan bahwa pada tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah dapat diproyeksi akan tumbuh sebesar dua digit (Rosalina, 2017)

Dapat terlihat sebenarnya bank syariah sudah memfasilitasi UMKM pada tahun 2015-2017 . Berikut ini adalah tabel pembiayaan UMKM di Bank Syariah:

1.1 Tabel Pembiayaan Syariah Sektor UMKM Tahun 2015-2017 pada Pulau Jawa (Milyar Rp)

Provinsi	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Jawa Barat	7.987	8.233	7.760
Banten	1.258	1.147	1.324
DKI Jakarta	8.573	8.862	10.279
D.I Yogyakarta	733	669	742
Jawa Tengah	3.740	4.212	3.569
Jawa Timur	4.567	5.035	5.468

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa pada setiap tahun mengalami peningkatan dalam pembiayaan UMKM dalam hal investasi dan modal kerja. Pada tahun 2015 sangat terlihat bahwa DKI Jakarta sangat berpotensi dalam

pembiayaan UMKM sebesar 8.573 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2016 terlihat DKI Jakarta masih berpotensi sebesar 8.862 milyar rupiah . Akan tetapi di Jawa Barat sebesar , Jawa Tengah maupun di Jawa Timur mengalami peningkatan dapat berpotensi dalam UMKM oDari dana pembiayaan UMKM ini berasal dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan guna untuk investasi dengan berbagai akad.

Dapat dilihat bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2015-2017 pada Pulau Jawa sebagai berikut:

1.2 Tabel DPK Tahun 2015-2017 Pada Pulau Jawa (Milyar Rp)

Provinsi	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Jawa Barat	26.398	29.564	33.844
Banten	6.051	6.751	11.018
DKI Jakarta	113.36	134.736	161.917
D.I Yogyakarta	3.618	3.945	4.623
Jawa Tengah	12.421	15.325	18.351
Jawa Timur	19.754	21.543	26.233

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Dari data di atas terlihat bahwa dana yang terkumpul terlihat bahwa DKI Jakarta masih menjadi yang paling tinggi dari tahun 2015-2017. Akan tetapi pada beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan yang signifikan dari pada provinsi yang lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2018)

Akan tetapi apabila DPK semakin banyak dan menyebabkan pembiayaan harusnya semakin tinggi, jika tidak terealisasi dengan baik akan menyebabkan bahaya pihak Bank Syariah. Yang dapat terlihat pada NPF yang merupakan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Jadi semakin kecil nilai NPF akan memicu pada DPK dan pembiayaan akan semakin meningkat karena akan mempengaruhi reputasi dari Bank Syariahnya.

Dengan adanya penelitian yang sebelumnya memang sudah ada dan terdapat perbedaan antar penelitian terdahulu. Oleh karena itu diperlukan penelitian lanjutan agar dapat memperjelas kondisi yang sedang terjadi di Perbankan Syariah. Untuk itu penelitian ini berjudul **“Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Pulau Jawa Tahun 2010-2017”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM pada Bank Syariah Tahun 2010-2017 di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM pada Bank Syariah Tahun 2010-2017 di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM pada Bank Syariah Tahun 2010-2017 di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM pada Bank Syariah Tahun 2010-2017 di Pulau Jawa
2. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM pada Bank Syariah Tahun 2010-2017 di Pulau Jawa
3. Menganalisis pengaruh NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM pada Bank Syariah Tahun 2010-2017 di Pulau Jawa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini salah satunya penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh sewaktu duduk di bangku perkuliahan. Selain itu manfaatnya adalah :

1. Penelitian ini memberikan gambaran pengaruh jumlah dana pihak ketiga terhadap pembiayaan umkm

2. Memberikan gambaran pengaruh NPF terhadap pembiayaan umkm
3. Memberikan gambaran terhadap inflasi terhadap pembiayaan umkm
4. Memberikan gambaran bahwa bagi umkm supaya memahami bagaimana pembiayaan umkm yang terdapat pada Bank Syariah.
5. Memberikan gambaran dalam melakukan investasi pada Bank Syariah pada pembiayaan mudharabah atau bagi hasil.

Hasil penelitian ini dapat memberi bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah pembiayaan umkm di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan proposal penelitian initerdapat pembahasan yang tersusun dalam beberapa kelompok, sehingga mempermudah dalam memahami maksud dan tujuan penulisan laporan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

- A. Kajian pustaka: memuat penelian dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan.
- B. Landasan Teori: memuat teori-teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti, dan juga berisikan diskripsi secara teoritis tentang variabel-variabel yang relevan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang uraian bahan atau materi penelitian, alat, uji penelitian, jalan penelitian, variabel data-data yang akan dikumpulkan dan analisis hasil.

BAB IV: HASIL ANALISIS

Berisikan tentang semua temuan–temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analistik statistik.

BAB V: SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Menurut kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah serta implikasi kebijakan yang bisa digunakan bagi pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dengan penjelasan berikut. Yang pertama penelitian oleh Rahmat Dahlan pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah. Dengan menggunakan variable dependen dan independen diantaranya pada variable dependen yaitu Pembiayaan Bank Syariah sedangkan pada variable independen menggunakan variabel SBIS dan Inflasi dengan metode analisis regresi *ordinary least square*. Dengan terdapat dua kesimpulan bahwa pada tingkat bonus SBIS berpengaruh signifikan dengan hubungan yang negatif terhadap Pembiayaan Bank Syariah. Yang kedua pada tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Dahlan, 2014)

Pada penelitian yang kedua oleh Rina Destiana pada tahun 2016 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan variable dependen dan independen diantaranya pada variable dependen yaitu Pembiayaan UMKM sedangkan variable independen menggunakan variable DPK, Likuiditas, Permodalan dan Profitabilitas dengan metode regresi berganda. Dimana menghasilkan kesimpulan bahwa DPK dan Likuiditas berpengaruh positif

secara signifikan terhadap Pembiayaan UMKM, sedangkan pada Permodalan, Profitabilitas dan Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM (Destiana, 2016).

Pada penelitian yang ketiga oleh Sagitaria Saputri dan Muhammad Ghafur Wibowo pada tahun 2018 dengan judul Determinan Pembiayaan UMKM Di Indonesia Tahun 2011-2015: *Pendekatan Generalized Method Of Moment* (GMM). Dengan menggunakan variable dependen dan independen diantaranya pada variable dependen yaitu Pembiayaan UMKM sedangkan variable independen menggunakan FDR, IPI,DPK dan NPF dengan metode Estimasi GMM Arellano-Bond. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa FDR dan IPI memiliki pengaruh positif terhadap Pembiayaan UMKM. Sedangkan DPK dan NPF memiliki pengaruh negatif terhadap Pembiayaan UMKM yang ada di 5 provinsi di Indonesia(Saputri & Wibowo, 2018).

Pada penelitian yang keempat oleh Wida Purwidiyanti dan Arini Hidayah pada tahun 2014 dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Perbankan Syariah Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia. Menggunakan variabel dependen dan independen diantaranya variable dependen adalah Pembiayaan Syariah sedangkan variable independen adalah DPK,CAR,ROA,NPF dan Inflasi dengan analisis regresi berganda. Menghasilkan kesimpulan bahwa DPK, CAR, dan ROA mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah untuk mendukung UMKM. Sedangkan CAR, NPF dan Inflasi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap

Pembiayaan Perbankan Syariah untuk mendukung UMKM (Purwidianti & Hidayah, 2014).

Pada penelitian yang kelima oleh Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. Menggunakan variable dependen dan independen diantaranya variable dependen yaitu Pembiayaan Murabahah dan variable independen menggunakan DPK,CAR,SWBI dan NPF dengan analisis regresi linier berganda. Yang menghasilkan kesimpulan Bahwa DPK berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pembiayaan Murabahah, CAR dan SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah dan memiliki hubungan positif tetapi SWIB memiliki hubungan negatif .Sedangkan NPF tidak berpengaruh secara positif terhadap Pembiayaan Murabahah (Wardiantika & Kusumaningtias, 2014).

Pada penelitian yang keenam oleh Devi Permatasari dan Ahmad Rudi Yulianto pada tahun 2017 dengan judul Analisis Kerja Keuangan: Kemampuan Bank Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan. Menggunakan variable dependen dan independen diantaranya variable dependen yaitu Pembiayaan Syariah sedangkan variable independen menggunakan DPK,NPF,CAR, dan ROA dengan metode analisis regresi linier berganda. Yang hasilkan kesimpulan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Syariah sedangkan CAR dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Syariah (Permatasari & Yulianto, 2017).

Pada penelitian yang ketujuh oleh Ahmad Muhammad Ryad dan Yupi Yuliawati pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) , Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan. Dengan menggunakan variable dependen dan independen diantaranya variable dependen yaitu Pembiayaan Syariah sedangkan variable independen menggunakan DPK,CAR dan NPF dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dengan kesimpulan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan sedangkan CAR dan NPF tidak berpengaruh positif terhadap Pembiayaan (Ryad & Yuliawati, 2017)

Pada penelitian yang kedelapan oleh Ayank Narita Dytama dan Imamudin Yuliadi pada tahun 2015 dengan judul Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Menggunakan variabel depeden dan independen diantaranya variable dependen adalah Pembiayaan Syariah sedangkan variable independen mengguakan DPK, ROA dan NPF dengan analisis regresi berganda. Dengan mengasilkan kesimpulan bahwa DPK memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Syariah, sedangkan ROA memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Syariah dan NPF memiliki hubungan negatif tetapi signifikan terhadap Pembiayaan Syariah (Dyatama & Yuliadi, 2015).

Pada penelitian yang kesembilan oleh Luluk Chorida pada tahun 2010 dengan judul Pengaruh jumlah dana, inflasi, dan margin terhadap pembiayaan UKM (studi pada Bank- bank syariah di Indonesia). Menggunakan variabel dependen dan independen diantaranya variable dependen adalah Pembiayaan

UMKM sedangkan variable independen menggunakan DPK, Inflasi, Tingkat Margin dan Pinjaman dengan analisis kuantitatif deskriptif regresi berganda. Dengan kesimpulan Secara simultan terdapat pengaruh signifikansi dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin terhadap alokasi pembiayaan UKM pada bank-bank syariah di Indonesia. Dari ketiga variabel independen (jumlah dana pihak ketiga, inflasi, tingkat margin) yang mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (pembiayaan UKM) adalah alokasi dana pihak ketiga dengan nilai statistik t hitung sebesar 16,619 (Chorida, 2010).

Pada penelitian kesepuluh oleh Risyia Maulida Septiana pada tahun 2013 dengan judul Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor. Menggunakan variabel dependen dan independen diantaranya variabel dependen yaitu Keuntungan Usaha sedangkan variabel independen menggunakan Lama Pendidikan, Jumlah Pembiayaan Mikro Syariah BMT, Perubahan omset dan Total Aset dengan menggunakan *ordinary least square*. Dapat disimpulkan hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan mikro syariah BMT berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan usaha UMKM (Septiana, 2013)

Pada penelitian kesesebelas oleh Dani Nugraha pada tahun 2015 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2010- Juni 2015). Menggunakan variabel dependen dan independen diantaranya variabel dependen yaitu Pembiayaan Syariah sedangkan variabel independen menggunakan DPK, CAR, NPF, Inflasi dan SBIS dengan menggunakan regresi MWD. Dapat disimpulkan hasil

penelitiannya juga menunjukkan bahwa DPK, CAR dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Syariah sedangkan NPF dan SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Syariah. (Nugraha, 2015)

Pada penelitian keduabelas oleh Shintia Dewi Nur Ajizah pada tahun 2018 dengan judul Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Menggunakan variabel dependen dan independen diantaranya variabel dependen yaitu Pembiayaan Murabahah sedangkan variabel independen menggunakan DPK, Suku Bunga Konsumsi BPR Konvensional, Inflasi, NPF dan Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan Uji Kointegrasi ARDL . Dapat disimpulkan hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa DPK, Suku Bunga Konsumsi BPR Konvensional , Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah sedangkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. (Dewi, 2018)

Dengan keduabelas penelitian tersebut beberapa dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini seperti pada (Destiana, 2016) mengacu pada DPK terhadap pembiayaan UMKM yang berpengaruh positif dan signifikan. Selain itu pada (Saputri & Wibowo, 2018) mengacu pada NPF yang berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif. Selain itu pada (Chorida, 2010) mengacu pada inflasi yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang didalamnya terdapat beberapa pasal yang membahas secara jelas mengenai UMKM diantaranya (“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” 2008) :

- Pada Bab II mengenai Asas dan Tujuan yang dibahas pada Pasal 2 mengenai bagaimana cara mengatur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas yang bersifat berwawasan lingkungan. Merupakan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus memprioritaskan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- Pada Bab VI Pasal 20 yang membahas mengenai bagaimana cara mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan guna pengembangan usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan insentif.
- Pada Bab VII mengenai Pembiayaan dan Penjaminan pada Pasal 22 mengenai cara untuk meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Dimana pemerintah sudah berusaha dengan beberapa cara yaitu mengelola sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan supaya

lebih berkembang. Selain itu dengan lembaga modal ventura dan transaksi anjak piutang.

2.2.1.1 Kategori UMKM

Pengelompokkan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atas dasar nilai aset yang dimiliki usaha dan hasil penjualan yang didapatkan. Yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 kriterianya sebagai berikut (“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” 2008):

2.1 Tabel Kriteria Jenis Usaha Menurut Omzet dan Asset

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

2.2.2 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu usaha dari Perbankan Syariah dimana kegiataannya untuk menyediakan dana ataupun modal dan selain itu dalam bentuk hutang/ tagihan. Terdapat hasil produk dari pembiayaan yang sudah di jabarkan pada PBI No 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut (Wangsawidjaja A. DR, 2012):

a. Transaksi Bagi Hasil

Transaksi Bagi Hasil biasanya dalam bentuk mudharabah dan musyarakah dimana dalam penggunaannya untuk pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil yang menghasilkan produk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Dimana pembiayaan mudharabah menggunakan akad mudharabah yaitu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama adalah yang mampu memberikan keseluruhan modal yang dikatakan sebagai malik, sahibul mal atau bank syariah.

Kemudian terdapat pihak kedua sebagai pengelola modal tersebut dan akan membagi keuntungan dengan pihak pertama dengan sesuai perjanjian atau kesepakatan di awal. Akan tetapi jika terjadi kerugian maka pihak bank syariah yang akan menanggung kerugian kecuali pihak kedua terbukti melakukan kesalahan yang disengaja maka akan sesuai dengan akad di awal.

Dan pada pembiayaan musyarakah menggunakan akad musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak dari kerjasama tersebut memberikan porsi modalnya dengan ketentuan. Apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai porsi modalnya pada setiap pihaknya dan sebaliknya terjadi kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan di awal pada pembagian porsi modalnya.

b. Transaksi Sewa Menyewa

Transaksi sewa menyewa biasanya dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik* dan dengan dasar penggunaannya untuk pembiayaan menggunakan prinsip sewa menyewa yang menghasilkan produk

pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahiya bitamlik. Dimana pembiayaan ijarah menggunakan akad ijarah yaitu pemindahan manfaat dari suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu dengan membayar sewa atau ujarah , tetapi tidak memindahkan kepemilikan barang tersebut.

Sedangkan pembiayaan *ijarah muntahiya bitamlik* menggunakan akad *ijarah muntahiya bitamlik* yaitu menyediakan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari barang atau jasa yang berdasarkan transaksi sewa tetapi terdapat pilihan untuk memindahkan kepemilikan atas barang tersebut.

c. Transaksi Jual-Beli

Transaksi Jual beli biasanya dalam bentuk murabahah , istishna dan salam dengan dasar penggunaannya untuk pembiayaan menggunakan prinsip jual beli yang menghasilkan produk pembiayaan murabahah , pembiayaan istishna dan pembiayaan salam. Dimana pembiayaan murabahah menggunakan akad murabahah yaitu pembiayaan pada suatu barang dimana harga akan barangnya sudah dipertegas di awal kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati dari kelebihan harganya.

Sedangkan pembiayaan istishna menggunakan akad istishna yaitu pembiayaan pada suatu barang dimana melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk pembuatan barang tertentu. Dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang sudah di sepakati antara pemesan dan pembeli. Selanjutnya pembiayaan salam menggunakan akad salam yaitu pembiayaan suatu barang dengan melakukan pemesanan dan

pembayaran dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang sudah disepakati.

d. Transaksi Pinjam-Meminjam

Transaksi Pinjam meminjam biasanya dalam bentuk pintung qard dengan dasar penggunaannya untuk pembiayaan menggunakan prinsip pinjam meminjam yang menghasilkan produk pembiayaan qard menggunakan akad qard yaitu pinjaman dana untuk nasabah dimana nasabah wajib mengembalikan dana tersebut dengan tepat waktu.

e. Transaksi Sewa Menyewa Jasa

Transaksi sewa menyewa jasa biasanya dalam bentuk ijarah untuk multijasa dengan dasar penggunaannya untuk pembiayaan menggunakan prinsip sewa menyewa jasa yang menghasilkan pembiayaan ijarah dan pembiayaan kafalah. Dimana pembiayaan ijarah dengan jasa yaitu sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan dalam menggunakan atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek yang disewakan.

Sedangkan pembiayaan kafalah yaitu transaksi penjamin yang diberikan oleh yang menanggung kepada pihak ketiga atau orang bertanggung untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua.

Selain itu Pembiayaan di Indonesia yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan telah membuat matriks SPS yaitu matriks Statistika Perbankan Syariah dalam menjalankan jasa keuangannya. Sehingga dapat terlihat bagaimana perkembangan pembiayaan di Lembaga keuangan syariah yang pada awalnya menggunakan

berdasarkan akad yang digunakan seperti Bagi Hasil , Piutang , Ijarah , dan Salam (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Dan berdasarkan Jenis penggunaan dan kategori usaha terbagi dalam tiga jenis penggunaannya yaitu Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi. Dengan kategori usahanya pada setiap jenis penggunaannya dalam Modal Kerja dan Investasi terdapat dua kategori yaitu UMKM dan bukan UMKM akan tetapi pada konsumsi adalah bukan UMKM . Selain itu berdasarkan Lapangan usaha dan Non Lapangan Usaha Debiturnya yang didalamnya dalam lapangan usaha sudah dikelompoknya seperti pertanian hingga badan nasional dan internasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

2.2.2.1 Pembiayaan UMKM Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan UMKM sudah mulai berkembang di Indonesia dimana memiliki karakter yang berbeda dari Bank Konvensional yang menerapkan kredit. Sehingga adanya pembiayaan UMKM pada Bank Syariah dapat berpengaruh pada sektor rill dalam perekonomian Indonesia. Pada sektor rill merupakan sektor yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Dikarenakan semakin berkembangnya UMKM dikarenakan minat masyarakat terhadap UMKM menjadikan OJK membuat sebuah Roadmap Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2015-2019. Membahas bagaimana kedepannya Perbankan Syariah yang terlihat pada data SPS selain itu menangani isu yang menjamur mengenai Perbankan Syariah (Departemen Perbankan Syariah, 2015)

Diantara dengan biaya yang mahal menjadikan keterbatasan pembiayaan UMKM membuat OJK akan merubah struktur dana dan alokasi pembiayaan supaya menunjang setiap segmen di masyarakat. Pelayanan yang belum variatif dan belum sesuai yaitu pada variasi pembiayaan yang dibutuhkan nasabah.

Sehingga OJK membuat program keberpihakan UKM oleh Bank Syariah ditunjukkan melalui inovasi / variasi mengenai bagaimana strategi pembiayaan , Program Linkage , Pilot project , memanfaatkan dana sosial dan dapat bekerjasama technical assistance. Dengan adanya program yang rancang tersebut supaya dapat meningkatkan kinerja dari Lembaga Keuangan tentunya Perbankan Syariah (Departemen Perbankan Syariah, 2015)

Dari penjabaran di atas bahwa pembiayaan UMKM dapat berprinsip syariah apabila pembiayaan dilakukan dengan ketentuan sesuai fatwa. Selain itu dapat diperjelas bahwa dalam Pembiayaan UMKM dengan Prinsip Syariah menggunakan akad yang jelas dapat terlihat pada penggolongan OJK dalam pembiayaan syariah.

2.2.3 Dana Pihak Ketiga

Terdapat pada UU Perbankan RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang merupakan dari revisi UU Perbankan RI No. 10 tahun 1998 yaitu pada dasarnya dana yang sudah dipercayakan Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 2008).

Dalam matriks SPS yang dibuat oleh OJK terlihat pada Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah yang dijelaskan mengenai penyaluran dana, sumber dana, dan komponen modal lainnya. Dilihat pada sumber dana dimana komponennya adalah DPK, kewajiban kepada BI, Kewajiban kepada Bank lain, Surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima kewajiban spot dan derivatif yang terakhir kewajiban lainnya. Dari komponen tersebut bahwa DPK termasuk dalam sumber dana dimana terdapat komponen didalamnya yaitu dalam satuan rupiah dan valas yang komponennya adalah Giro, Tabungan, Simpanan berjangka (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Sehingga dapat dikatakan dana simpanan atau DPK yang bersumber dari masyarakat berbentuk produk seperti: giro, deposito, dan tabungan. Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: (Dendawijaya, 2009)

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

2.2.3.1 Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan UMKM

Dana Pihak Ketiga dikatakan sebagai sumber dana yang berasal dari nasabah ataupun masyarakat yang digunakan berdasarkan akad yang diinginkan nasabah maupun masyarakat. Dari penjabaran di atas bahwa kegiatan dari perbankan syariah bukan hanya sebagai penghimpun melainkan sebagai penyalur dana yang ditujukan bagi pihak yang membutuhkan. Sehingga untuk menjalankan tugasnya secara otomatis dana yang sudah terkumpul atau DPK disalurkan ataupun didistribusikan ke pihak yang membutuhkan yaitu melalui pembiayaan.

Dimana dalam pembiayaan setiap perbankan berbeda-beda produknya tetapi pada akadnya sama hanya istilahnya dan pelayanannya. Dengan ini sudah digolongkan oleh OJK dalam berbagai penggolongan supaya membantu dalam membaca data yang tersedia. Dapat dilihat pada matriks SPS yang sudah tertera pada OJK.

2.2.4 Inflasi

Dalam penjelasan Bank Indonesia merupakan kondisi dimana kenaikan harga barang ataupun jasa yang secara umum dan terus menerus dengan jangka waktu tertentu. Yang dikarenakan terjadi kenaikan harga dari salah satu atau dua barang saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi akan tetapi apabila kenaikan harga barang atau jasa tersebut semakin meluas dapat diartikan mengakibatkan kenaikan harga barang yang lainnya dapat dikatakan inflasi (Bank Indonesia, 2018).

Selanjutnya penjelasan Badan Pusat Statistika merupakan kondisi yang cenderung terjadi kenaikan harga akan barang atau jasa yang berlangsung secara terus menerus yang terjadi didalam negeri. Apabila kenaikan harga atas barang atau jasa tersebut semakin meningkat dapat menyebabkan turunya nilai uang, dengan demikian dapat diartikan bahwa penurunan nilai uang terhadap nilai barang atau jasa secara umum (Badan Pusat Statistika, 2018)

2.2.4.1 Hubungan Inflasi Terhadap Pembiayaan UMKM

Dalam pengertian inflasi menurut BI dan BPS pada dasarnya adalah kenaikan harga barang secara umum yang itu terjadi bersamaan dan berlangsung terus menerus. Apabila terjadi pergerakan inflasi maka berpengaruh pada pembiayaan

UMKM dapat digolongkan menjadi dua akibat dimana saat tingkat Inflasi yang mengalami kenaikan melebihi angka dua digit maka terjadilah kenaikan harga-harga umum dan menurunkan nilai uang (Badan Pusat Statistika, 2018)

Akan tetapi dapat meningkatkan angka pengangguran dikarenakan harga yang meningkat menjadikan konsumsi masyarakat semakin tinggi dengan pendapatan yang tetap. Dapat dikatakan bahwa semakin tingginya tingkat inflasi maka angka pembiayaan UMKM akan semakin meningkat tetapi juga cukup berbahaya karena ditakutkan akan terjadi kredit macet, diragukan ataupun kurang lancar.

Akan tetapi berbeda keadaanya jika meningkatnya tidak terlalu tinggi atau masih dapat diatas atau dapat dikendalikan. Menyebabkan insentif untuk kenaikan produksi barang atau jasa. Dengan meningkatkan produksi diperlukan modal yang dapat berasal dari pembiayaan terutama bagi pelaku UMKM akan lebih mudah untuk pembiayaan UMKM.

Sehingga inflasi dapat mempengaruhi pembiayaan secara tidak langsung dengan melalui berbagai jalur. Dimana ketika inflasi terkendali membuat masyarakat akan mendorong dalam bekerja sehingga akan lebih banyak yang mengadakan investasi. Dengan inflasi yang dikendalikan oleh Bank Indonesia dengan tetap terkendali menyebabkan pengaruh terhadap pembiayaan dan dapat dikatakan inflasi dapat berpengaruh pada pembiayaan.

2.2.5 Non Performing Finance (NPF)

Penjabaran Non Performing Finance (NPF) terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 23 Agustus 2013 membahas mengenai

NPF merupakan jumlah dari pembiayaan atau kredit yang macet, kurang lancar maupun diragukan yang disalurkan oleh Bank Umum . Sehingga dapat dibuat perhitungan sebuah rasio NPF total kredit ataupun pembiayaan dengan membandingkan total NPF terhadap pembiayaan kredit atau total NPF (“Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum di Indonesia,” 2015)

Hal tersebut bahwa NPF atau pembiayaan kredit yang dimaksud dalam perhitungan adalah dalam bentuk gross. Sehingga dapat dilihat perhitungan seperti dibawah ini :

$$NPF = \frac{Pembiayaan(KL, D, M)}{TotalPembiayaan} \times 100\%$$

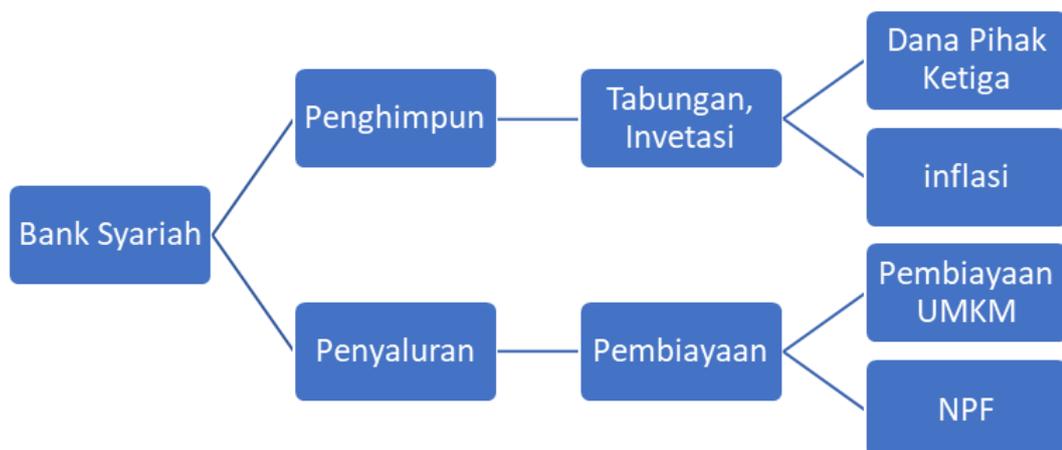
2.2.5.1 Hubungan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan UMKM

Penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa NPF melihat pada kesehatan pembiayaan pada perbankan syariah. Sehingga terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 23 Agustus 2013 yang menjelaskan mengenai pembiayaan UMKM akan diberikan kepada kredit UMKM sesuai porsi pengembalian kreditnya (“Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum di Indonesia,” 2015)

Dimana terdapat perhitungan mengenai NPF yang dikhususkan kepada kredit UMKM atau pembiayaan UMKM. Penjelasannya mengenai NPF untuk Pembiayaan UMKM hampir sama pada NPF pada umumnya tetapi pada total kreditnya hanya untuk pembiayaan UMKM saja. Seperti di bawah ini:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan UMKM (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.6 Kerangka Pemikiran



2.2.7 Hipotesis

H_{0.1} : DPK berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Syariah di Pulau Jawa

H_{a.1}: DPK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Syariah di Pulau Jawa

H_{0.2} : Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Syariah di Pulau Jawa

H_{a.2}: Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Syariah di Pulau Jawa

H_{0.3} : NPF berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Syariah di Pulau Jawa

H_{a.3}: NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Syariah di Pulau Jawa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan variable yang digunakan adalah 2 variable yaitu variable dependen dan variable independen. Berikut penjelasan kedua variable tersebut:

1. Variabel Dependen

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (*independent*). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikatnya adalah pembiayaan umkm syariah

2. Variabel Independen

Variabel bebas atau Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (*dependent*).

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya adalah :

1. Dana Pihak Ketiga
2. Non Performing Financing
3. Inflasi

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.1 Tabel Definisi Operasional Variable

Variable	Definisi	Satuan
Pembiayaan (Y)	Bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi multi jasa kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sebagai tugas utama bank.	Milyar Rupiah
Dana Pihak Ketiga (X1)	Dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan, kelompok, dan lembaga badan hukum dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan dana deposito mudharabah.	Milyar Rupiah
Non Performing Financing (X2)	Resiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemampuan bahwa pada saat jatuh tempo penggunaan dana gagal memenuhi kewajibannya terhadap bank.	Milyar Rupiah
Inflasi (X3)	Meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya	Persen

	ketidaklancaran distribusi barang	
--	-----------------------------------	--

3.3 Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah penelitian ini adalah regresi panel dengan alat pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9. Dengan jenis data regresi data panel memiliki karakteristik data *cross section* dan *time series*. Dengan ini maka model persamaan dapat di tulis sebagai berikut : (Hakim, 2014)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \dots + \epsilon_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N$$

$$t = 1, 2, \dots, T$$

dimana :

N= banyaknya observasi

T= banyaknya waktu

N dan T = Banyaknya data panel

➤ Untuk melakukan regresi diperlukan 3 (tiga) metode ,yaitu:

a) Common Effect Models

Metode Common effect merupakan metode yang paling awal digunakan atau dapat dikatakan paling sederhana sehingga untuk mengestimasi data panel yaitu

hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section dengan metode *ordinary least squares* (OLS). Metode ini diasumsikan bahwa data antara ruang dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan regresi dalam bentuk linier adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

b) Fixed Effect Models

Pada Fixed Effect Models menggunakan asumsi dimana koefisien regresi tetap antara ruang dan waktu. Dapat menggunakan estimasi model fixed effect dengan menggunakan dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Fixed Effect Models dalam estimasi sering disebut dengan least squares dummy variable (LSDV) dan ketika terdapat heteroskedastisitas menggunakan fixed effect dengan cross section weight. Model yang digunakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \dots + \epsilon_{it}$$

c) Random Effect Models

Random Effect Models dalam mengestimasi data panel menggunakan residual waktu dan individu yang saling berhubungan hal tersebut mempunyai intersep yang berbeda pada setiap subjeknya. Namun demikian mengasumsikan setiap intersep adalah variable random atau stokastik. Model untuk random effect sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_i$$

➤ Pemilihan Model

Pemilihan model dalam pengolahan data dengan mengestimasi 3 (tiga) teknis di atas, selanjutnya untuk mengetahui model mana yang paling terbaik diperlukannya uji pemilihan model. Yaitu terdapat 2 (dua) pertimbangan diantaranya:

1. Chow Test (Uji F-statistik)

Merupakan metode yang digunakan untuk memilih antara model common effect atau fixed effect. Dengan menggunakan asumsi bahwa:

H_0 = Menggunakan estimasi Common Effect Models

H_a = Menggunakan estimasi Fixed Effect Models

Dengan menggunakan nilai *p-value* dapat disimpulkan signifikan apabila kurang dari 5% atau 10% sehingga menggunakan estimasi Fixed Effect Models Sedangkan *p-value* disimpulkan tidak signifikan apabila lebih dari 5 % atau 10 % maka menggunakan estimasi Common Effect Models.

2. Uji Hausman

Merupakan metode yang digunakan untuk memilih antara model fixed effect atau random effect. Dengan asumsu bahwa :

H_0 = Menggunakan estimasi Fixed Effect Models

H_a = Menggunakan estimasi Random Effect Models

Dengan menggunakan nilai *p-value* dapat disimpulkan signifikan apabila kurang dari 5% atau 10% sehingga menggunakan estimasi Fixed Effect Models. Sedangkan *p-value* disimpulkan tidak signifikan apabila lebih dari 5 % atau 10 % maka menggunakan estimasi Random Effect Models.

3.3.1 Pengujian Hipotesis

3.3.1.1 Koefisien Determinasi (R²)

Dalam melakukan uji regresi linier berganda dapat dianalisis besarnya koefisien regresi (R²) merupakan pengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan atau menjelaskan variasi variabel dependen/variabel terikat. Sehingga R² digunakan dalam menetapkan paling baik dalam analisis regresi berganda. Apabila R² mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut dalam menerangkan variabel terikatnya. Dan apabila nilainya mendekati nol maka tidak ada hubungan antara variable-variable independen dengan dependen.

3.3.1.2 Uji Coefficient

Uji Coefficient merupakan uji yang dapat mengetahui pengaruh pada setiap variabel independen yang terdapat didalam model terhadap variabel dependen. Sehingga untuk mengetahui seberapa pengaruhnya variabel-variabel bebas yang digunakan menjelaskan variabel terikat. Dengan hal tersebut dapat pengambilan keputusan dengan dasar nilai probabilitas pada hasil regresinya.

Apabila dari perhitungan menggunakan Eviews diperoleh nilai Coefficient yang menjelaskan seberapa besar dari variable bebas yang mempengaruhi variable

terikat. Dan terdapat pada Coefficient dimana nilainya negatif ataupun tetap positif nilai dari Coefficient menandakan jika negatif maka hubungannya tidak searah dan positif hubungannya searah. Tingkat signifikansi dari uji Coefficient dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program Eviews pada kolom Coefficient.

3.3.1.3 Uji T

Uji t dapat digunakan menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan uji t (parsial) didasarkan pada nilai probabilitas yang didapat dari hasil pengolahan data. Apabila dari perhitungan menghasilkan nilai $P \text{ value} < 0,05$ maka variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang ada dalam model. Sebaliknya apabila $P \text{ value} > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya atau dengan kata lain tidak ada pengaruh antara dua variabel yang diuji.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Analisis Deskripsi Data

Menggunakan data di atas dengan penelitian menggunakan analisis panel dengan mengkaji bagaimana pengaruh dari Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia selama 8 tahun dari 2010 hingga 2017. Dengan menggunakan data time series yaitu pada tahun 2010 hingga 2017 dan data cross section yaitu pada provinsi di Pulau Jawa terdapat 5 provinsi yang digunakan.

Sehingga menggunakan beberapa variable yaitu variable independen yaitu Dana Pihak Ketiga , Non Performing Financing, dan Inflasi. Dan variable dependen yaitu Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan menggunakan analisis panel dan alat bantu analisis data berupa alat bantu *Econometric Eviews 9*.

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1.1 Pembiayaan UMKM Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

4.1 Tabel Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2017 (Milyar Rupiah)

Provinsi	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	215.55	298.248	391.477	531.401	506.174	778.082	129.133	349.543
Jawa Barat	47.025	77.638	100.275	122.656	125.501	94.187	108.525	105.698
Banten	10.199	20.428	25.416	32.378	30.44	17.49	18.156	17.835
Jawa Tengah	29.416	45.239	59.416	73.51	77.397	46.951	61.92	65.824
DIYogyakarta	93.282	9.771	11.682	11.671	10.939	10.314	11.341	11.126
Jawa Timur	39.559	70.858	90.722	114.028	121.086	63.092	70.884	78.286

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 hingga 2017 pada provinsi di Pulau Jawa. Bahwa DKI Jakarta selalu bernilai tertinggi pada Pembiayaan UMKM meskipun mengalami fluktuasi. Dan posisi yang terendah masih provinsi DIYogyakarta meski tidak terlalu fluktuatif nilainya. Dapat dilihat pada tahun 2012 menuju 2013 hampir pada seluruh provinsi mengalami kenaikan.

Dengan meningkatnya pada setiap provinsi dalam pembiayaan UMKM dikarenakan pada perbankan syariah dalam menghadapi tekanan ekonomi makro .Sehingga memfokuskan pada pembiayaan pada sektor UMKM dan konsumsi. Sedangkan untuk sektor lain contohnya pada komersil dan impor yang cukup tinggi akan segera di kurangi. (“Perbankan Syariah Fokus ke UMKM dan Konsumsi | Suara Pembaruan,” 2013)

Dan pada tahun selanjutnya setiap provinsi nilainya fluktuatif, dapat dikatakan pada Provinsi DKI Jakarta menjadi tertinggi karena kebanyakan pusat

dari perbankan syariah berada di DKI Jakarta. Sehingga informasi mengenai adanya pembiayaan UMKM lebih mudah didapatkan.

4.1.1.2 Dana Pihak Ketiga

4.2 Tabel Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2017 (Milyar Rupiah)

Provinsi	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	326.885	516.149	696.506	894.374	1.133.149	2.784.370	1.477.205	3.743.901
Jawa Barat	85.25	119.545	168.116	203.266	249.803	279.62	328.308	344.242
Banten	25.609	39.156	60.255	65.736	61.516	66.429	77.479	90.868
Jawa Tengah	30.657	45.815	64.522	85.706	103.801	127.359	151.857	174.196
DIYogyakarta	11.867	16.997	22.693	27.216	35.988	40.039	46.901	47.987
Jawa Timur	55.768	87.4	122.466	170.092	203.644	216.835	235.738	247.334

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK

Dari data di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga pada provinsi di Pulau Jawa selama 2010-2017 hampir mengalami kenaikan proporsinya. Meskipun proporsi yang tertinggi masih DKI Jakarta dan terendah pada DIYogyakarta. Terlihat pada tahun 2013 menuju 2014 mengalami kenaikan pada setiap provinsi.

Seperti yang sudah dijelaskan terdapat hubungan antara pembiayaan umkm dengan DPK dimana pada tahun tersebut mengalami kesadaran akan UMKM. Sehingga mendorong adanya keinginan investasi dalam bentuk syariah sehingga penopang dari pembiayaan umkm. Selain itu terlihat pada tahun ketahun mengalami kenaikan yang terlihat 2016 menuju 2017.

Dikarenakan setelah adanya kebijakan amnesty pajak pada awal tahun memang mengalami penurunan. Akan tetapi mengalami kenaikan pada

pertengahan tahun disebabkan kepercayaan masyarakat menitipkan uangnya kepada bank syariah dan semakin meratanya literasi lembaga keuangan (Muqoddam, 2017) Dan sampai akhir tahun 2017 hingga Januari 2018 Statistik Perbankan Syariah (SPS) Mencatat pada tahun 2018 bulan January pertumbuhan nasabah bank syariah naik 18,05 % pertahun.sedangkan,Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa Bank Konvensional Lebih rendah 4-5% pertumbuhannya dibanding bank syariah yakni hanya mencapai 14% pertahun (Wahyudi, 2018)

4.1.1.3 Inflasi

4.3 Tabel Inflasi Berdasarkan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2017(%)

Provinsi	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	5,95	3,97	4,52	5,67	6,15	3,35	2,37	3,72
Jawa Barat	6,62	3,1	3,86	9,15	7,6	2,73	2,75	3,63
Banten	6,1	3,45	4,37	9,64	10,2	4,29	2,49	3,5
Jawa Tengah	4,97	4,58	4,1	6,81	6,525	5,57	3,16	3,62
DIYogyakarta	6,87	3,88	6,5	7,32	2,63	1,16	1,149	2,5
Jawa Timur	6,95	4,29	4,5	7,59	7,77	3,08	2,74	4,04

Sumber : Badan Pusat Statistika,BPS

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi tahun 2010-2017 pada provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuatif. Pada setiap tahunnya di berbagai provinsi mengalami fluktuatif yang tidak dapat dikatakan kapan pada berbagai wilayah mengalami kenaikan yang bersamaan. Akan tetapi hanya terlihat pada tahun 2013 yang mengalami kenaikan inflasi dikarenakan kenaikan harga BBM menjadikan harga bahan pokok lain juga meningkat (Ahnier, 2014).

4.1.1.4 Non Performing Financing

4.4 Tabel Non Performing Financing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2017 (%)

Provinsi	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	5,09	4,90	3,08	2,61	4,57	5,10	3,68	3,19
Jawa Barat	3,76	2,61	2,68	3,01	5,32	4,89	4,74	3,75
Banten	4,05	2,62	2,20	1,82	4,02	5,40	4,43	3,04
Jawa Tengah	3,06	4,10	2,87	2,81	5,23	3,35	0,98	1,11
DIYogyakarta	2,89	3,16	1,67	1,51	5,49	1,97	0,33	0,13
Jawa Timur	1,18	1,40	1,49	2,20	5,02	4,41	1,79	1,39

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat NPF tahun 2010-2017 pada provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuatif nilainya. Dimana pada setiap provinsi tidak dapat dikatakan yang tertinggi dimana maupun yang terendah pada setiap urutan tahun. Dikarenakan pada setiap tahun nilainya fluktuatif dapat terlihat pada tahun 2010 nilai NPF hampir menyentuh lebih dari 5%.

Dikarenakan pada mulanya Bank syariah belum kokoh dalam menyelenggarakan adanya pembiayaan syariah dengan kepercayaan masyarakat yang masih minim. Akan tetapi pada setiap tahun mengalami perbaikan meskipun tetapi fluktuatif, pada tahun 2015 terlihat hampir pada setiap provinsi mengalami kenaikan. Bukan berarti dari kredit macet menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan NPF pada perbankan syariah meningkat (Muhammd, 2015)

Dimana peningkatan kredit macet dapat disebabkan karena tidak adanya control dari konsumennya sehingga pembiayaan tidak berkembang menjadikan rasio NPF akan meningkat. Sehingga biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi yang pelosok. Menyebabkan pangsapasar untuk bank syariah masih dibawah dari bank konvensional karena belum terbiasa dengan adanya fasilitas bank syariah.

4.2 Hasil Uji Regresi Panel

4.2.1 Pemilihan Model

Pemilihan Model yang digunakan untuk memperoleh pertimbangan yang berdasarkan statistik. Oleh karena itu dapat ditunjukkan dengan memperoleh dugaan yang efisien.

4.6 Tabel Hasil Common Effect Models

Dependent Variable: LOG(Pembiayaan)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/12/18 Time: 06:27
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.999382	0.807025	1.238353	0.2222
LOG(DPK)	0.790889	0.067243	11.76173	0.0000
INFLASI	0.129590	0.038788	3.340983	0.0017
NPF	0.016910	0.058827	0.287458	0.7751
R-squared	0.783119	Mean dependent var		10.98063
Adjusted R-squared	0.768332	S.D. dependent var		1.153064
S.E. of regression	0.554992	Akaike info criterion		1.739928
Sum squared resid	13.55270	Schwarz criterion		1.895862
Log likelihood	-37.75828	Hannan-Quinn criter.		1.798856
F-statistic	52.95876	Durbin-Watson stat		0.798111
Prob(F-statistic)	0.000000			

4.7 Tabel Hasil Fixed Effect Models

Dependent Variable: LOG(Pembiayaan)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/12/18 Time: 06:27
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.058318	1.519256	4.645904	0.0000
LOG(Pembiayaan)	0.290040	0.123241	2.353440	0.0237
INFLASI	0.096985	0.032432	2.990368	0.0048
NPF	0.013683	0.050244	0.272327	0.7868

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.881894	Mean dependent var	10.98063
Adjusted R-squared	0.857667	S.D. dependent var	1.153064
S.E. of regression	0.435016	Akaike info criterion	1.340493
Sum squared resid	7.380320	Schwarz criterion	1.691343
Log likelihood	-23.17183	Hannan-Quinn criter.	1.473080
F-statistic	36.40158	Durbin-Watson stat	1.566280
Prob(F-statistic)	0.000000		

4.2.2 Hasil Uji F-Statistik (Chow Test)

4.2.2.1 Hasil Uji Chow Test

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan untuk estimasi antara Common Effect atau Fixed Effect seperti yang di tunjukkan pada hasil di atas, dengan hipotesis:

H_0 = Menggunakan estimasi Common Effect Models

H_a = Menggunakan estimasi Fixed Effect Models

Dengan menggunakan nilai p -value dapat disimpulkan signifikan apabila kurang dari 5% atau 10% sehingga menggunakan estimasi Fixed Effect Models. Sedangkan p -value disimpulkan tidak signifikan apabila lebih dari 5% atau 10% maka menggunakan estimasi Common Effect Models.

4.8 Tabel Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.523366	(5,39)	0.0002
Cross-section Chi-square	29.172887	5	0.0000

Dari hasil di atas maka dengan p -value dapat dilihat pada Cross-section Chi-square sebesar 29.172940 dan pada Probabilitasnya sebesar 0.0000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Probabilitas sebesar 0.0000 kurang dari 5% atau 10% sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Dapat disimpulkan bahwa p -value signifikan dan dapat menggunakan estimasi Fixed Effect Model.

4.2.3 Hasil Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan untuk estimasi antara Fixed Effect atau Random Effect seperti yang ditunjukkan pada hasil di atas, dengan hipotesis:

Ho = Menggunakan estimasi Fixed Effect Models

Ha = Menggunakan estimasi Random Effect Models

Dengan menggunakan nilai *p-value* dapat disimpulkan signifikan apabila kurang dari 5% atau 10% sehingga menggunakan estimasi Fixed Effect Models. Sedangkan *p-value* disimpulkan tidak signifikan apabila lebih dari 5% atau 10% maka menggunakan estimasi Random Effect Models.

4.9 Tabel Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.286156	3	0.0025

Dari hasil di atas maka dengan *p-value* dapat dilihat pada Cross-section Random sebesar 14.286122 dan pada Probabilitasnya sebesar 0.0025. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Probabilitas sebesar 0.0025 kurang dari 5% atau 10% sehingga menolak Ho dan menerima Ha. Dapat disimpulkan bahwa *p-value* signifikan dan dapat menggunakan estimasi Fixed Effect Models.

5. Tabel Hasil Random Effect Models

Dependent Variable: LOG(Pembiayaan)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/12/18 Time: 06:28
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.997667	1.017872	2.945034	0.0051
LOG(DPK)	0.620482	0.082799	7.493870	0.0000
INFLASI	0.121869	0.031375	3.884291	0.0003
NPF	0.030818	0.048784	0.631736	0.5308

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.268212	0.2754
Idiosyncratic random		0.435016	0.7246

Weighted Statistics			
R-squared	0.537525	Mean dependent var	5.462296
Adjusted R-squared	0.505993	S.D. dependent var	0.693778
S.E. of regression	0.487626	Sum squared resid	10.46230
F-statistic	17.04678	Durbin-Watson stat	1.042884
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.749581	Mean dependent var	10.98063
Sum squared resid	15.64844	Durbin-Watson stat	0.697256

4.2.4 Estimasi Fixed Effect

5.1 Tabel Hasil Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Pembiayaan)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/12/18 Time: 06:27
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.058318	1.519256	4.645904	0.0000
LOG(Pembiayaan)	0.290040	0.123241	2.353440	0.0237
INFLASI	0.096985	0.032432	2.990368	0.0048
NPF	0.013683	0.050244	0.272327	0.7868

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.881894	Mean dependent var	10.98063
Adjusted R-squared	0.857667	S.D. dependent var	1.153064
S.E. of regression	0.435016	Akaike info criterion	1.340493
Sum squared resid	7.380320	Schwarz criterion	1.691343
Log likelihood	-23.17183	Hannan-Quinn criter.	1.473080
F-statistic	36.40158	Durbin-Watson stat	1.566280
Prob(F-statistic)	0.000000		

Persamaan Regresi

$$\text{Log(Pembiayaan UMKM)} = 7.058307 + 0.290041 * \text{Log(DPK)} + \\ 0.096985 * \text{Inflasi} + 0.013685 * \text{NPF}$$

4.2.5 Pengujian Hipotesis

5.2 Tabel Hasil Fixed Effect Models

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	7.058.307	4.645.908	0.0000
LOG(DPK)	0.290041	2.353.450	0.0237
INFLASI	0.096985	2.990.369	0.0048
NPF	0.013685	0.272373	0.7868

4.2.5.1. Uji Kebaikan Regresi / Koefisien Determinasi (R²)

Digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. R² mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Non Performing Financing dalam model regresi yang menerangkan variabel dependen yaitu Pembiayaan UMKM. Dan dari hasil regresi *Fixed Effect Model* diketahui R² sebesar 0.881895, menunjukkan bahwa Pembiayaan UMKM dapat dijelaskan oleh variable DPK, Inflasi dan NPF sebesar 88% dan 12% di jelaskan menggunakan variable lainnya di luar model.

4.2.5.2 Hipotesis Uji T

1. Pengujian terhadap koefisien variable Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dapat dilihat pada koefisien DPK sebesar $\beta_1 = 0.290041$ dengan diketahui nilai t-hitung sebesar 2.353450 dan nilai Probabilitas DPK 0.0237, lebih kecil

dari $\alpha = 10\%$ maka signifikan yang berarti bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM.

2. Pengujian terhadap koefisien variable Inflasi

Dapat dilihat pada koefisien Inflasi sebesar Nilai $\beta_2 = 0.096985$ dengan diketahui nilai t-hitung sebesar 2.990369 dan Nilai Prob Inflasi 0.0048 lebih kecil dari $\alpha 10\%$ maka signifikan yang berarti bahwa variable Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan UMKM . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM.

3. Pengujian terhadap koefisien variable Non Performing Financing (NPF)

Dapat dilihat pada koefisien Inflasi sebesar Nilai $\beta_3 = 0.013685$ dengan nilai t-hitung sebesar 0.272373 dan Nilai Prob NPF 0.7868 lebih besar dari $\alpha 10\%$ maka tidak signifikan yang berarti bahwa variable NPF tidak ada pengaruh terhadap Pembiayaan UMKM .

4.2.5.3 Uji Coefficient

1. Dilihat pada nilai β_0 sebesar 7.058307 dapat dikatakan bahwa terjadi hubungan yang searah antara berarti ketika DPK , Inflasi dan NPF . Apabila DPK, Inflasi dan NPF bernilai nol % maka besarnya Pembiayaan UMKM akan meningkat sebesar 7.058307 % terhadap DPK.

2. Dilihat pada nilai $\beta_1 = 0.290041$ yang memiliki hubungan searah antara DPK dan Pembiayaan UMKM. Dapat dijelaskan ketika DPK meningkat sebesar 1 % maka Pembiayaan UMKM akan meningkat sebesar 0.290041 % .

3. Dilihat pada nilai $\beta_2 = 0.096985$ yang memiliki hubungan searah antara Inflasi dan Pembiayaan UMKM. Dapat dijelaskan ketika Inflasi naik 1% maka Pembiayaan UMKM akan meningkat sebesar 0.096985 %.

4. Dilihat pada nilai $\beta_3 = 0.013685$ yang memiliki hubungan searah antara NPF dan Pembiayaan UMKM. Dapat dijelaskan ketika NPF meningkat 1 % maka Pembiayaan UMKM akan meningkat sebesar 0.013685 %

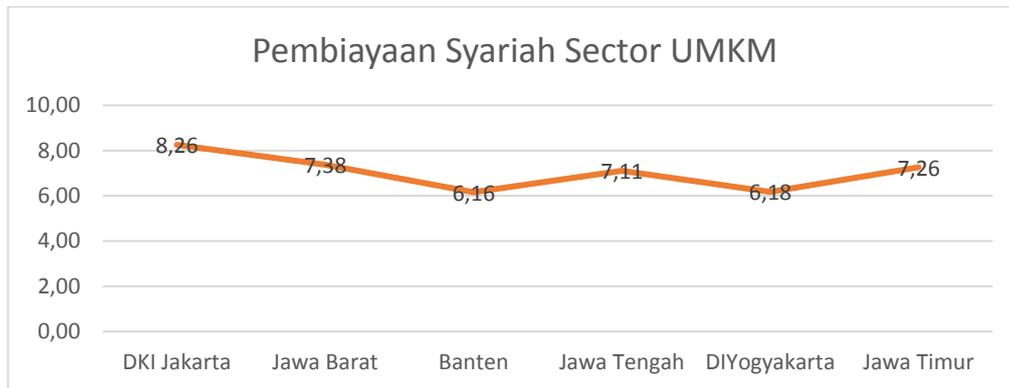
4.2.5.4 Cross Effect

5.3 Tabel Hasil Cross Effect

	CROSSID/Provinsi	Koefisien
1	DKI Jakarta	1.197201
2	Jawa Barat	0.318989
3	Banten	-0.895003
4	Jawa Tengah	0.051222
5	DIYogyakarta	-0.878637
6	Jawa Timur	0.206228

Dengan Persamaan Regresi :

$$\text{LOG(PEMBIAYAAN)} = 7.0583071435 + 0.290040522659 * \text{LOG(DPK)} + 0.0969846698449 * \text{INFLASI} + 0.0136850174845 * \text{NPF} + [\text{CX=F}]$$



Gambar 4.1 Cross Section Pembiayaan Syariah Sector UMKM

Cross Section Effect digunakan untuk memberikan peringkat pada setiap daerah yang memiliki perbedaan paling tinggi pada pembiayaan umkm . Sehingga dapat kesimpulan dari hasil cross effect Y (Pembiayaan UMKM) tertinggi oleh DKI Jakarta sebesar 8.2555081435 sedangkan Y (Pembiayaan UMKM) terendah pada Banten sebesar 6.1633041435.

Dikarenakan pada tahun 2017 pemerintahan DKI Jakarta adanya porsi penyaluran kredit terhadap kredit nasional cukup besar, yakni hingga 50 persen. Target pertumbuhan kredit DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 10-12 persen Kemudian mencanangkan dengan salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan program OKE-OCE yang dicanangkan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dengan upaya mencari UMKM potensial (Setiawan, 2017) .Pada tahun 2014 Banten masuk dalam 10 golongan daerah yang dalam melakukan pengelolaan dana UMKM yang sangat rendah(Dami, 2014).

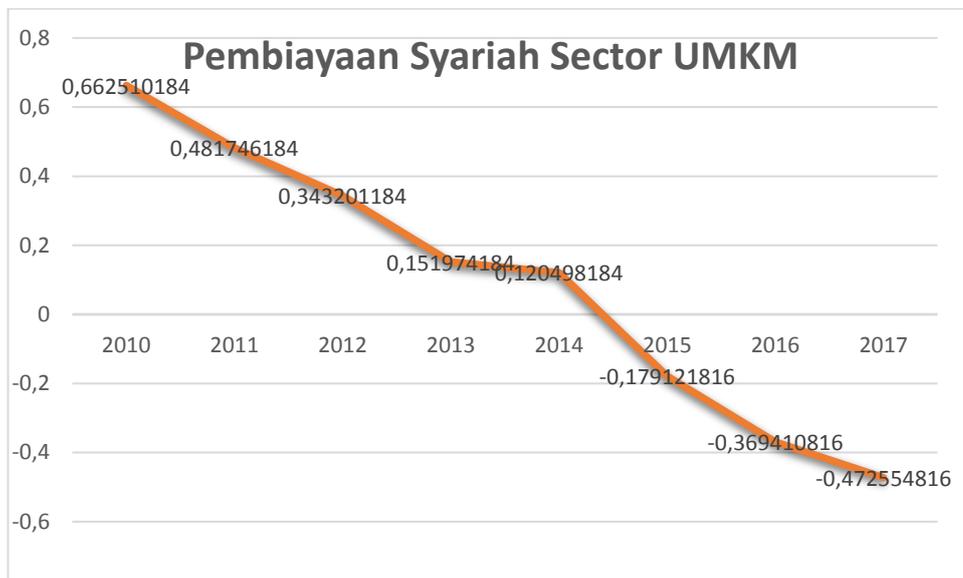
4.2.5.5 Periode Effect

5.4 Tabel Hasil Periode Effect

	Tahun	Koefisien
1	2010	0,570155
2	2011	0,389391
3	2012	0,250846
4	2013	0,059619
5	2014	0,028143
6	2015	-0,271477
7	2016	-0,461766
8	2017	-0,56491

Dengan Persamaan Regresi:

$$\text{LOG(PEMBIAYAAN)} = 0.0923551839749 + 0.907908984844*\text{LOG(DPK)} + \\ 0.0620160461505*\text{INFLASI} - 0.0290274348369*\text{NPF} + [\text{PER}=F]$$



Gambar 4.2 Periode Effect Pembiayaan Syariah Sector UMKM

Periode Effect digunakan untuk memperingkatkan pada tahun keberapa yang memiliki perbedaan cukup tinggi pada pembiayaan umkm. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari Period Fixed Effect nilai tertinggi pada tahun 2010 sebesar 0,6625101839749 sedangkan nilai terendah pada tahun 2017 sebesar -0,4725548160251.

4.3 Analisis Ekonomi

4.3.1 Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan UMKM

DPK berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan UMKM yang terlihat pada uji hipotesis diantaranya pada Uji F, Uji T dan Koefisien Determinasi. Maka pada saat kenaikan ataupun penurunan DPK akan berpengaruh pada perbankan syariah dalam hal Pembiayaan UMKM. Dikarenakan sumber dari pembiayaan berasal dari DPK dimana mengalokasikan dana untuk pemilik modal

ke yang membutuhkan modal. Dan dari data di atas pun setiap tahunnya pada setiap provinsi pun DPK semakin meningkat menandakan banyaknya DPK yang tersalurkan berarti nasabah mempercayai apabila dananya disimpan kepada bank syariah.

Menurut penelitian (Destiana, 2016) mengatakan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada bank syariah di Indonesia. Selain itu menurut (Purwidiyanti & Hidayah, 2014) menemukan bukti bahwa secara parsial bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan yang mendukung UMKM pada bank syariah di Indonesia.

Akan tetapi menurut (Saputri & Wibowo, 2018) mengatakan bahwa DPK memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada 5 provinsi di Indonesia dengan pembiayaan terbesar pada tahun 2011-2015.

Dari tiga penelitian terdahulu yang menjadi acuan dimana DPK dapat berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM karena DPK adalah hasil penghimpunan dari tabungan, giro dan deposito milik nasabah atau dapat dikatakan pemilik modal. Dimana menggunakan akad wadiah dan mudharabah, hal ini dari akad mudharabah seperti akad bagi hasil dalam konvensional seperti investasi.

Akad tersebut dilakukan untuk menyalurkan dari DPK untuk yang membutuhkan modal dengan berbagai sektor seperti bukan UMKM dan UMKM. Dalam sektor bukan UMKM dapat dilihat pada data Statistika Perbankan Syariah di OJK pada sektor apa saja dan begitu juga pada UMKM.

Dapat terlihat bahwa yang digunakan untuk analisis pada cross section nya adalah provinsi yang memiliki DPK terbesar di Indonesia sehingga mencakup di berbagai tempat yang jangkauannya tidak berdekatan. Dimana dalam memperoleh informasi mengenai adanya pembiayaan untuk mendukung UMKM pun belum sepenuhnya paham .

Ataupun di wilayahnya memang masyarakatnya tidak banyak jumlah UMKM nya menjadikan pembiayaan untuk UMKMpun sedikit. Dan DPK dalam penyaluran tidak sepenuhnya untuk UMKM dimana terdapat sektor bukan UMKM yang lebih mendominasi. Dan menurut penelitiannya yang disebutkan bahwa terdapat penolakan permintaan permodalan UMKM karena kredit macet, jaminan yang tidak mencukupi dan arus kas yang tidak stabil.

4.3.2 Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan UMKM

Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan UMKM yang terlihat dari uji hipotesis diantaranya pada Uji F, Uji T dan Koefisien Determinasi. Maka pada saat kenaikan ataupun penurunan Inflasi akan berpengaruh pada perbankan syariah dalam hal Pembiayaan UMKM. Dengan tingkat inflasi adalah presentase kenaikan harga-harga pada satu tahun menjadi sebuah masalah perekonomian. Dengan inflasi yang sangat tinggi menandakan bahwa harga di masyarakat akan meningkat sehingga menjadikan jumlah pembiayaan UMKM yang dikeluarkan akan meningkat karena pengaruh harga yang meningkat.

Hal ini pada setiap tahun di provinsinya mengalami peningkatan pada inflasi meskipun tidak signifikan akan berpengaruh pada Pembiayaan UMKM yang semakin meningkat akibat biaya yang dikeluarkan semakin meningkat akibat inflasi yang tinggi menjadikan jumlah nominal pada inflasi meningkat.

Terdapat beberapa penelitian yang mengatakan (Dahlan, 2014) mengatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif secara parsial terhadap Pembiayaan UMKM dan berpengaruh positif dengan SBIS secara simultan terhadap Pembiayaan UMKM. Menurut (Purwidiyanti & Hidayah, 2014) mengatakan bahwa hipotesisnya mengatakan berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan yang mendukung UMKM.

Akan tetapi setelah penelitian ternyata memiliki koefisien yang positif menjadikan tidak terdukungnya hipotesis tersebut. Dengan ini bahwa Inflasi dapat mengakibatkan penanaman modal yang masih spekulatif dan tingkat bunga yang tinggi menjadikan menurunkan investasi. Jika sebaliknya dengan tingkat inflasi yang meningkat tetapi terkendali menjadikan insentif untuk meningkatkan produksi dimana dalam meningkatkan produksi diperlukan modal. Sehingga modal tersebut dapat dari pembiayaan terutama pembiayaan UMKM.

Secara teori inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga investasi akan semakin menurun akan tetapi di Indonesia berbeda karena respon dari inflasi cukup responsif sehingga fluktuatif inflasi cukup berpengaruh pada daya beli dan investasi. Sehingga semakin tinggi inflasi dapat meningkatkan pembiayaan.

4.3.3 Analisis Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan UMKM

NPF berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan yang terlihat pada uji hipotesis diantaranya pada Uji F, dan Koefisien Determinasi kecuali pada Uji T . Dimana NPF merupakan kemungkinan bank syariah mengalami kerugian dimana tidak ada hubungan secara langsung dengan Pembiayaan UMKM. Jadi dalam nasabah dalam melakukan pembiayaan dapat melihat dari segi manajemen kinerja dari perbankannya tersebut. Apabila dana mereka titipkan ke bank tersebut bagaimana pengelolaannya dan pengembaliannya . Jadi tinggi rendahnya pembiayaan tidak signifikan dipengaruhi oleh NPF karena NPF merupakan faktor yang tidak secara signifikan atau langsung dalam perubahan pembiayaan

Dikarenakan NPF merupakan nilai dari kinerja suatu bank dalam mengelola pembiayaan, semakin tinggi NPF maka semakin rendah pembiayaan yang dilakukan karena adanya ketidak sehatan pada pembiayaan karena adanya kredit macet karena arus kas dari peminjam modal yang tidak baik dan jaminan yang tidak mencukupi.

Dalam beberapa penelitian seperti (Saputri & Wibowo, 2018) mengatakan NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan UMKM. Akan tetapi menurut (Purwidiyanti & Hidayah, 2014) menghasilkan bahwa dengan hipotesisnya NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan untuk mendukung UMKM dengan penelitiannya mendukung hal tersebut.

Menurut kedua penelitian dikatakan bahwa NPF yang rendah ataupun tinggi sebagai bukti bahwa kesehatan dari perbankan tersebut selain itu sifat yang ketat

atau kehati-hatian perbankan dalam melakukan investasi atau pembiayaan. Sehingga meminimalisis NPF yang tinggi dengan cara mempertimbangkan pembiayaan UMKM supaya mengurangi adanya kredit macet.

Sehingga NPF memang tidak berpengaruh pada Pembiayaan Syariah Sector UMKM karena dalam melakukan pembiayaan tidak terlalu mempertimngkan dalam aspek NPF nya atau kesehatan dari perbankan kecuali dalam melakukan investasi ke perbankan baru memperhatikan bagaimana NPF dalam perbankan dengan diketahui NPF nya maish berkisar 1%-5% di Pulau Jawa yang dapat dikatakan masih relatif rendah denagn ini dalam melakukan investasi terlihat masih terjamin.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Hasil dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana pengaruh DPK, NPF dan Infasi terhadap pembiayaan UMKM syariah pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Pulau Jawa pada tahun 2010-2017. Dengan rumusan masalah yang sudah terjawab secara jelas dijabarkan . Dengan menggunakan data panel dan analisis regresi panel maka akan diperjelas bagaimana hasilnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dari rumusan masalah yang pertama mengenai DPK berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Dapat dijelaskan bahwa DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan UMKM di Pulau Jawa pada tahun 2010-2017. Hal tersebut DPK merupakan hasil penghimpunan dari tabungan, giro dan deposito milik nasabah atau dapat dikatakan pemilik modal. Dimana menggunakan akad wadiah dan mudharabah, hal ini dari akad mudharabah seperti akad bagi hasil dalam konvensional seperti investasi. Akad tersebut dilakukan untuk menyalurkan dari DPK untuk yang membutuhkan modal dengan berbagai sektor seperti UMKM.
2. Dari rumusan masalah yang pertama mengenai Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Dapat dijelaskan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan UMKM di Pulau Jawa pada tahun 2010-2017. Hal tersebut

karena kenaikan tingkat inflasi pada Pulau Jawa masih terkendali tidak terlalu tinggi kenaikan tingkat inflasi. Menyebabkan adanya insentif terhadap kenaikan produksi. Dimana membutuhkan modal yang dapat berupa pembiayaan dalam sektor UMKM.

3. Dari rumusan masalah yang pertama mengenai NPF berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Akan tetapi tidak sesuai karena NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM di Pulau Jawa pada tahun 2010-2017. Dikarenakan NPF merupakan nilai kinerja dari sebuah perbankan dalam melakukan pembiayaan. Sehingga bukannya NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan UMKM akan tetapi Pembiayaan UMKM yang berpengaruh terhadap NPF karena Perbankan akan memberikan pembiayaan UMKM jika pelaku UMKM memperjelas arus kasnya. Sehingga semakin banyak pembiayaan UMKM yang lancar maka menyebabkan rasio NPF menurun.

5.2 Implikasi

1. Pada pihak Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah lebih meningkatkan pada Pembiayaan UMKM Syariah yang lebih produktif yaitu tidak pada sector konsumsi tetapi untuk investasi ataupun modal sehingga akan banyak dari masyarakat akan berminat untuk berinvestasi pada sector UMKM. Karena sedang menjamurnya UMKM yang cukup menjadikan masyarakat dapat lebih mandiri atau dikatakan pada sector riil dengan ini nilai atau jumlah DPK akan semakin meningkat untuk sector UMKM. Akan tetapi juga dapat

mengontrol dari pinjaman UMKM supaya tidak menyebabkan NPF akan semakin meningkat yang menyebabkan banyaknya kredit yang macet membuat pihak bank akan lebih di rugikan.

2. Pemerintah diharapkan supaya mengelola inflasi dengan terkendali supaya pelaku UMKM dalam membeli barang modal tidak menyebabkan kerugian pada biaya produksi. Dengan inflasi terkendali menyebabkan masyarakat memiliki daya beli yang lebih untuk mengkonsumsi sehingga pelaku UMKM akan lebih memproduksi banyak produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahniar, N. F. (2014). Dampak Kenaikan Harga BBM, Inflasi November 1,5 Persen - Katadata News. Retrieved November 9, 2018, from <https://katadata.co.id/berita/2014/12/01/dampak-kenaikan-harga-bbm-inflasi-november-15-persen>
- Ariyanti, F. (2017). Bunga KUR Turun Jadi 7 Persen di 2018 - Bisnis Liputan6.com. Retrieved November 9, 2018, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3142754/bunga-kur-turun-jadi-7-persen-di-2018>
- Badan Pusat Statistika. (2018). Inflasi. Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>
- Bank Indonesia. (2018). Pengenalan Inflasi. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>
- Chorida, L. (2010). *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada bank-bank syariah di . . Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri* Retrieved from http://myrahdika.ueuo.com/jurnal3/dana_pihak_ketiga_thdp_pembiayaan.pdf
- Dahlan, R. (2014). Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Etikonomi*, 13(2), 104–117.

- Dami, L. (2014). Banten Masuk 10 Besar Terendah dalam Pengelolaan Dana Bergulir - BeritaSatu.com. Retrieved November 9, 2018, from <http://www.beritasatu.com/makro/221286-banten-masuk-10-besar-terendah-dalam-pengelolaan-dana-bergulir.html>
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan* (1st ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Perbankan Syariah. (2015). Roadmap-Pbs_2015-2019.Pdf.
- Destiana, R. (2016). Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jrka*, 2(1), 15–28.
- Dewi, S. (2018). *Aanalisis Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Dyatama, A. N., & Yuliadi, I. (2015). Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan UMY*, 16(1), 73–83.
- Hakim, A. (2014). *Pengantar Ekonometrika* (1st ed.). Yogyakarta: EKONISIA.
- Mubarok, F. (2018). UMKM Tulang Punggung Perekonomian Bangsa - Validnews.co. Retrieved November 9, 2018, from <https://www.validnews.id/UMKM-Tulang-Punggung-Perekonomian-Bangsa-rOF>
- Muhammd, D. (2015). NPF Bank Syariah Gede Bukan karena Kredit Macet |

Republika Online. Retrieved November 9, 2018, from
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah_ekonomi/15/09/08/nud0fx254-npf-bank-syariah

Muqoddam, F. (2017). BANK SYARIAH □: Dana Pihak Ketiga Melaju. Retrieved November 9, 2018, from
<http://kalimantan.bisnis.com/read/20171110/446/707683/bank-syariah-dana-pihak-ketiga-melaju>

Nugraha, D. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2010-Juni 2015)*. Universitas Islam Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Matriks Penyempurnaan SPS New.

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Statistik Perbankan Syariah. Retrieved from
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>

Perbankan Syariah Fokus ke UMKM dan Konsumsi | Suara Pembaruan. (2013). Retrieved November 9, 2018, from
<http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/perbankan-syariah-fokus-ke-umkm-dan-konsumsi/41715>

Permatasari, D., & Yulianto, A. R. (2017). Analisis Kinerja Keuangan □: Kemampuan Bank Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan, *6*(1), 13–28.

Purwidiyanti, W., & Hidayah, A. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*

Alokasi Pembiayaan Perbankan Syariah Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi , Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jalan Raya Dukuh Waluh PO BOX 202 Purwokerto 53182 Telp E.

Rosalina, D. (2017). OJK: Pembiayaan syariah bisa naik 10% -12% di 2018.

Retrieved November 9, 2018, from

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-pembiayaan-syariah-bisa-naik-10-12-di-2018>

Ryad, A. M., & Yuliawati, Y. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 5(3), 1535–1540. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9216>

Saputri, S., & Wibowo, M. G. (2018). Determinan Pembiayaan UMKM di Indonesia Tahun 2011-2015□: Pendekatan Generalized Method Of Moment (GMM), *10*(1), 5–36.

Septiana, R. M. (2013). *Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM di Kabupaten Bogor.*

Setiawan, S. R. D. (2017). Porsi Pembiayaan UMKM di DKI Jakarta Masih

Minim - Kompas.com. Retrieved November 9, 2018, from

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/15/092230026/porsi-pembiayaan-umkm-di-dki-jakarta-masih-minim>

Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum di Indonesia. (2015), *119*(3),
859{\textendash}867.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (2008). *UU No. 20 Tahun 2008*,
(1), 1–31.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah. (2008). *UU No. 21 Tahun 2008*, *39*(5), 561–563.

Wahyudi, M. D. (2018). Bank Konvensional vs Bank Syariah, Siapa yang Lebih
Unggul Dalam Segi Sistem dan Pertumbuhan Nasabah? oleh Samsung Aja
Halaman all - Kompasiana.com. Retrieved November 9, 2018, from
<https://www.kompasiana.com/muhammaddickiwahyudivall007/5af653dfdd0fa80e93591d23/bank-konvensional-vs-bank-syariah-siapa-yang-lebih-unggul-dalam-segi-sistem-dan-pertumbuhan-nasabah?page=all>

Wangsawidjaja A. DR. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah* (1st ed.). Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.

Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan
Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun
2008-2012. *Ifstin Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, *2*(4), 1550–1561. Retrieved
from <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/11151>

LAMPIRAN

LAMPIRAN

I. Pembiayaan UMKM Syariah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Inflasi di Pulau Jawa 2010-2017

Provinsi	Tahun	Pembiayaan UMKM (Milyar Rp)	DPK (Milyar Rp)	INFLAS I (%)	NPF (%)
DKI Jakarta	2010	215,550	326,885	5.95	5.0908 333
DKI Jakarta	2011	298,248	516,149	3.97	4.8975
DKI Jakarta	2012	391,477	696,506	4.52	3.0783 333
DKI Jakarta	2013	531,401	894,374	5.67	2.6136 364
DKI Jakarta	2014	506,174	1,133,149	6.15	4.5669 384
DKI Jakarta	2015	778,082	2,784,370	3.35	5.1015 514
DKI Jakarta	2016	129,133	1,477,205	2.37	3.6838 578
DKI Jakarta	2017	349,543	3,743,901	3.72	3.1925 148
Jawa Barat	2010	47,025	85,250	6.62	3.7666 667
Jawa Barat	2011	77,638	119,545	3.1	2.6141 667
Jawa Barat	2012	100,275	168,116	3.86	2.6841 667
Jawa Barat	2013	122,656	203,266	9.15	3.0075
Jawa Barat	2014	125,501	249,803	7.6	5.3191 888
Jawa Barat	2015	94,187	279,620	2.73	4.8875 637
Jawa Barat	2016	108,525	328,308	2.75	4.7418 687
Jawa Barat	2017	105,698	344,242	3.63	3.7469 221

Banten	2010	10,199	25,609	6.1	4.0483 333
Banten	2011	20,428	39,156	3.45	2.615
Banten	2012	25,416	60,255	4.37	2.1983 333
Banten	2013	32,378	65,736	9.64	1.8191 667
Banten	2014	30,440	61,516	10.2	4.0198 791
Banten	2015	17,490	66,429	4.29	5.4003 094
Banten	2016	18,156	77,479	2.49	4.4253 069
Banten	2017	17,835	90,868	3.5	3.0436 583
Jawa Tengah	2010	29,416	30,657	4.97	3.055
Jawa Tengah	2011	45,239	45,815	4.58	4.1025
Jawa Tengah	2012	59,416	64,522	4.1	2.8658 333
Jawa Tengah	2013	73,510	85,706	6.81	2.8075
Jawa Tengah	2014	77,397	103,801	6.525	5.2306 788
Jawa Tengah	2015	46,951	127,359	5.57	3.3492 847
Jawa Tengah	2016	61,920	151,857	3.16	0.9759 776
Jawa Tengah	2017	65,824	174,196	3.62	1.1140 032
DIYogyakarta	2010	93,282	11,867	6.87	2.8908 333
DIYogyakarta	2011	9,771	16,997	3.88	3.155
DIYogyakarta	2012	11,682	22,693	6.5	1.6683 333
DIYogyakarta	2013	11,671	27,216	7.32	1.5083 333
DIYogyakarta	2014	10,939	35,988	2.63	5.4882 493
DIYogyakarta	2015	10,314	40,039	1.16	1.9694 052
DIYogyakarta	2016			1.149	0.3330

a		11,341	46,901		353
DIYogyakarta	2017	11,126	47,987	2.5	0.1316062
Jawa Timur	2010	39,559	55,768	6.95	1.1841667
Jawa Timur	2011	70,858	87,400	4.29	1.4
Jawa Timur	2012	90,722	122,466	4.5	1.4866667
Jawa Timur	2013	114,028	170,092	7.59	2.1958333
Jawa Timur	2014	121,086	203,644	7.77	5.0196457
Jawa Timur	2015	63,092	216,835	3.08	4.4092359
Jawa Timur	2016	70,884	235,738	2.74	1.7883679
Jawa Timur	2017	78,286	247,334	4.04	1.3859892

Sumber : Data OJK dan BI diolah , 2018

II. Hasil Estimasi Common Effect Models

Dependent Variable: LOG(Pembiayaan)

Method: Panel Least Squares

Date: 10/12/18 Time: 06:27

Sample: 2010 2017

Periods included: 8

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.999382	0.807025	1.238353	0.2222
LOG(DPK)	0.790889	0.067243	11.76173	0.0000
INFLASI	0.129590	0.038788	3.340983	0.0017
NPF	0.016910	0.058827	0.287458	0.7751
R-squared	0.783119	Mean dependent var		10.98063
Adjusted R-squared	0.768332	S.D. dependent var		1.153064
S.E. of regression	0.554992	Akaike info criterion		1.739928
Sum squared resid	13.55270	Schwarz criterion		1.895862
Log likelihood	-37.75828	Hannan-Quinn criter.		1.798856
F-statistic	52.95876	Durbin-Watson stat		0.798111
Prob(F-statistic)	0.000000			

III. Hasil Estimasi Fixed Effect Models

Dependent Variable: LOG(Pembiayaan)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/12/18 Time: 06:27
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.058318	1.519256	4.645904	0.0000
LOG(Pembiayaan)	0.290040	0.123241	2.353440	0.0237
INFLASI	0.096985	0.032432	2.990368	0.0048
NPF	0.013683	0.050244	0.272327	0.7868

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.881894	Mean dependent var	10.98063
Adjusted R-squared	0.857667	S.D. dependent var	1.153064
S.E. of regression	0.435016	Akaike info criterion	1.340493
Sum squared resid	7.380320	Schwarz criterion	1.691343
Log likelihood	-23.17183	Hannan-Quinn criter.	1.473080
F-statistic	36.40158	Durbin-Watson stat	1.566280
Prob(F-statistic)	0.000000		

IV. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.523366	(5,39)	0.0002
Cross-section Chi-square	29.172887	5	0.0000

V. Hasil Estimasi Random Effect Models

Dependent Variable: LOG(Pembiayaan)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/12/18 Time: 06:28
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 48
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.997667	1.017872	2.945034	0.0051
LOG(DPK)	0.620482	0.082799	7.493870	0.0000
INFLASI	0.121869	0.031375	3.884291	0.0003
NPF	0.030818	0.048784	0.631736	0.5308

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.268212	0.2754
Idiosyncratic random		0.435016	0.7246

Weighted Statistics			
R-squared	0.537525	Mean dependent var	5.462296
Adjusted R-squared	0.505993	S.D. dependent var	0.693778
S.E. of regression	0.487626	Sum squared resid	10.46230
F-statistic	17.04678	Durbin-Watson stat	1.042884
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.749581	Mean dependent var	10.98063
Sum squared resid	15.64844	Durbin-Watson stat	0.697256

VI. Hasil Uji Hausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.286156	3	0.0025

